

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
TAHUN ANGGARAN : 2023

| | |
|--------------|--|
| PROGRAM | PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT |
| KODE PROGRAM | 2.11.08 |
| | <p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kader Lingkungan Hidup dibentuk dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat dalam pengembangan dan pengendalian lingkungan hidup - Jumlah kader yang peduli terhadap lingkungan hidup di Kota Padang Panjang sebanyak 34 orang yang berasal dari 2 orang perkelurahan dan 1 orang perkecamatan - Kader Lingkungan Hidup berperan sebagai : <ol style="list-style-type: none"> a. Sebagai inisiator, dapat menjadi sumber ide/pemikiran yang bermanfaat melalui kepekaan dan pengetahuannya akan kondisi dan permasalahan lingkungan saat ini; b. Sebagai motivator, membangkitkan semangat dan dorongan kepada masyarakat untuk mengetahui, memahami, serta menyadari pentingnya pengelolaan Lingkungan hidup; c. Sebagai fasilitator, menjadi pendamping kegiatan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan pemerintah daerah maupun kegiatan yang dilakukan secara mandiri; d. Sebagai dinamisator, menjadi mitra aktif dan sejajar untuk dapat secara dinamis menyikapi kondisi lingkungan yang ada; e. Memfasilitasi dan mendampingi setiap event/acara penilaian-penilaian yang mengandung unsur peduli lingkungan hidup; f. Melakukan kunjungan, pendampingan dan pembinaan bagi sekolah Adiwiyata. <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan dilihat dari segi :</p> <p>Akses : Belum adanya kesadaran masyarakat terhadap pengelolaan lingkungan hidup</p> <p>Partisipasi : Persepsi yang menyatakan bahwa pengelolaan lingkungan hidup hanya merupakan tanggung jawab OPD Pelaksana Kebersihan</p> <p>Kontrol : Belum maksimalnya kinerja kader yang melaksanakan penyuluhan pada masing-masing kelurahan dan kecamatan</p> <p>Manfaat : Belum ada sanksi yang tegas dan nyata bagi pelanggaran pengrusakan lingkungan sehingga sosialisasi yang dilaksanakan oleh kader tidak berdampak secara signifikan</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pembinaan teknis terhadap usaha dan/atau kegiatan 2. SDM LH yang tidak memenuhi standar kompetensi 3. Keterbatasan Peralatan 4. Belum ada SDM Pegawai untuk melakukan pengawasan 5. Kurangnya Sosialisasi terhadap Masyarakat 6. Belum adanya peraturan perundangan undangan / perwako yang menyangkut tentang kebersihan lingkungan hidup <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih Rendahnya pemahaman masyarakat/ pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan Lingkungan Hidup, Mencintai Sungai dan Mengelola Limbah dengan Benar 2. Kurangnya partisipasi OPD lain terkait pembinaan dan pengendalian limbah usaha dan pencemaran sungai |
| | <p>1. Tolak Ukur</p> <p>Meningkatkan Kualitas Lingkungan (bersih, aman dan nyaman)</p> |

| | | | | | | | |
|--------------------------------|---|---------|-------------------|----------|--|-------|---|
| | <p>Indikator dan Target Kinerja Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas dan Sumber Daya Manusia Bidang Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat Input : Rp. 116.046.000,- Output : Jumlah Pertemuan Kader Lingkungan, 4(empat kali) Outcome : Peningkatan SDM Kader Lingkungan</p> | | | | | | |
| JUMLAH ANGGARAN PROGRAM | Rp. 194.398.200,- | | | | | | |
| | <p>1. Melaksanakan Pembinaan terhadap Masyarakat Kampung Iklim</p> <table border="1" data-bbox="590 638 1348 911"> <tr> <td data-bbox="590 638 678 672">Masukan</td> <td data-bbox="678 638 1348 672">Rp. 116.046.000,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 672 678 705">Keluaran</td> <td data-bbox="678 672 1348 705">Jumlah Pertemuan Kader Lingkungan, 4(empat kali)</td> </tr> <tr> <td data-bbox="590 705 678 911">Hasil</td> <td data-bbox="678 705 1348 911">Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat tingkat Kabupaten / Kota</td> </tr> </table> | Masukan | Rp. 116.046.000,- | Keluaran | Jumlah Pertemuan Kader Lingkungan, 4(empat kali) | Hasil | Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat tingkat Kabupaten / Kota |
| Masukan | Rp. 116.046.000,- | | | | | | |
| Keluaran | Jumlah Pertemuan Kader Lingkungan, 4(empat kali) | | | | | | |
| Hasil | Terlaksananya Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Masyarakat tingkat Kabupaten / Kota | | | | | | |

Padang Panjang, Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
 Permukiman dan Lingkungan Hidup
 Kota Padang Panjang



ALVI SENA, ST, MT

NIP.19750825 200212 1 004

GENDER BUDGET STATEMENT (Pernyataan Anggaran Gender)

OPD : Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Lingkungan Hidup Kota Padang Panjang
TANUN ANGGARAN : 2023

| | |
|--------------|--|
| PROGRAM | PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH) |
| KODE PROGRAM | 2.11.06 |
| | <p>1. Data Pembuka Wawasan (Data Pilah Gender)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Jumlah usaha dan / atau kegiatan yang memiliki Izin Lingkungan s/d 2021 sebanyak 34 Usaha dan/atau kegiatan dan memiliki SPPL sebanyak 71 usaha dan/ atau kegiatan - Tingkat ketaatan terhadap pengelolaan lingkungan hidup Tahun 2021 sebesar 52,4% - Berdasarkan Pengawasan yang dilakukan terhadap objek masyarakat, usaha/kegiatan pada tahun 2022 ditemui beberapa hal sebagai berikut : <ol style="list-style-type: none"> 1) Umumnya usaha dan/atau kegiatan belum memenuhi persyaratan teknis pengelolaan lingkungan, seperti belum memiliki IPAL yang memadai, sehingga Izin Pembuangan Limbah Cair nya tidak bisa diperoleh 2) Tidak melakukan kewajiban pemantauan kualitas lingkungan |
| | <p>2. Isu dan Faktor Kesenjangan Gender</p> <p>a. Faktor Kesenjangan dilihat dari segi :</p> <p>Akses : Mengurus Persetujuan Lingkungan (AMDAL, UKL-UPL) dianggap susah dan membutuhkan biaya yang cukup tinggi</p> <p>Partisipasi : - Memenuhi kriteria teknis pengelolaan lingkungan hidup dianggap menyita waktu dan biaya - Pelaku usaha/kegiatan yang wajib diawasi hanya Amdal dan UKL-UPL</p> <p>Kontrol : Terbatasnya jumlah personel yang melakukan pengawasan</p> <p>Manfaat : - Tidak semua pelaku usaha/kegiatan wajib diawasi pengelolaan lingkungannya - Pelaku usaha/kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan pengelolaan lingkungan berpotensi mencemari lingkungan hidup</p> <p>b. Penyebab Internal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pembinaan teknis terhadap usaha dan/atau kegiatan terkait pengelolaan lingkungan hidup 2. SDM LH yang tidak memenuhi standar kompetensi pengawasan 3. Keterbatasan Sarana dan Prasarana ke Lapangan 4. Belum ada SDM Pengawas yang berwenang menerapkan sanksi kepada pelaku usaha/kegiatan yang tidak mematuhi ketentuan pengelolaan lingkungan 5. Kurangnya Sosialisasi terhadap Masyarakat <p>c. Penyebab Eksternal</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih rendahnya pemahaman masyarakat / pelaku usaha dan/atau kegiatan terhadap peraturan perundang-undangan terkait Lingkungan Hidup, Kurangnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan kurangnya pengetahuan pengelolaan limbah secara benar 2. Kurangnya partisipasi OPD terkait dalam pembinaan dan pengendalian penanganan limbah usaha/kegiatan |
| | <p>1. Tolak Ukur</p> <p>Meningkatkan kualitas Lingkungan Hidup (bersih, aman dan nyaman)</p> |
| | Indikator dan Target Kinerja |

| | |
|--|--|
| Indikator dan Target Kinerja | |
| <p>Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) di terbitkan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota</p> <p>Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</p> <p>Input : Rp 23.052.500,-</p> <p>Output : Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sebanyak 25 Laporan</p> <p>Outcome : Meningkatnya Kualitas Air, Udara dan Tutupan Lahan</p> | |
| JUMLAH ANGGARAN PROGRAM | Rp 23.052.500,- |
| | 1. Melaksanakan Pengawasan setiap bulan ke lapangan yang dilakukan oleh Tim Pengawasan |
| Masukan | Rp 23.052.500,- |
| Keluaran | Jumlah Usaha / Kegiatan yang diawasi (105 Usaha/Kegiatan) |
| Hasil | Adanya Pengawasan Izin Lingkungan terhadap Usaha / Kegiatan |

Padang Panjang, Maret 2022

Kepala Dinas Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Lingkungan Hidup
Kota Padang Panjang



ALVI SENA, ST. MT
NIP.19750825 200212 1 004